

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tata Kelola Pemerintahan Indonesia mengalami proses transformasi dari model sentralisasi menjadi terdesentralisasi, yang mengakibatkan lahirnya sebuah otonomi di Indonesia. *Self-Governing* atau otonomi yang diterapkan di Indonesia tidak hanya berlaku untuk tingkat daerah saja, melainkan juga diperluas hingga mencakup desa. Hal ini berarti bahwa desa berhak secara mandiri mengatur jalannya pemerintahan dan pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakatnya (Widianingsih et al., 2020).

Menjadi sebuah daerah yang mendapatkan kekuasaan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri atau *self-Governing*, Maka desa perlu mencari sumber pendanaan sendiri guna mengembangkan infrastruktur dan pelayanan publiknya. Meskipun terdapat regulasi yang menjelaskan bahwa desa akan mendapatkan bantuan setiap tahunnya dari APBN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) dan (4), namun desa tidak dapat bergantung seutuhnya pada bantuan APBN tersebut. Untuk memanfaatkan potensi-potensi yang terdapat di desa sebagai sumber pendapatan bagi desa maka pemerintah desa harus bisa mengidentifikasi dan mengelola dengan baik potensi yang ada mencakup dalam hal Sumber Daya Alam (SDA) ataupun Sumber Daya Manusia (SDM). Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dan mengelola SDM

dengan baik, pemerintah desa dapat membantu mengembangkan sumber pendapatan yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat desa.

Pemerintah telah mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa Berikut disebut BUMDes. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa diberikan wewenang untuk mendirikan BUMDes yang berguna untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi wirausaha perdesaan”. Kebijakan tersebut juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes memiliki tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha, memaksimalkan pemanfaatan aset, pengoptimalan investasi dan kinerja, menyediakan layanan atau kegiatan usaha lainnya yang berbeda guna meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal (3).

BUMDes dibentuk untuk mengumpulkan potensialitas yang ada di wilayah desa yang kemudian diolah, dikembangkan, serta dimanfaatkan oleh masyarakat desa, sehingga diharapkan mampu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di desa. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 mengenai Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 ayat (2), BUMDes merupakan entitas usaha yang kepemilikan sepenuhnya dipegang oleh desa dengan kekayaan lokal desa yang terpisah. Tujuannya adalah mengelola aset, menyediakan layanan jasa, dan menjalankan berbagai kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Keberadaan BUMDes diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) berdasarkan hasil dari kegiatan ekonomi dan usaha yang dilaksanakannya.

Dengan berdirinya BUMDes tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan memupuk modal. Penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUMDes. BUMDes berhak mengajukan penyertaan modal selama program dan kegiatan BUMDes masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Pada tahap inilah penggerak BUMDes maupun pengurus BUMDes harus aktif dan berani menyuarakan aspirasi mereka untuk BUMDes melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa. Pengurus BUMDes dapat mengajukan program, kegiatan dan anggaran termasuk penyertaan modal selama rencana tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Provinsi Kepulauan Riau salah satu wilayah Kepulauan di Indonesia dengan pusat pemerintahannya berada di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau memiliki 5 kabupaten dan 2 kota mencakup 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa. Salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau adalah Kabupaten Bintan yang terdiri

dari 10 kecamatan, 15 kelurahan dan 36 desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bintan, saat ini BUMDes yang telah didirikan di Kabupaten Bintan berjumlah 36 BUMDes. Adapun jumlah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Jumlah BUMDes di Kabupaten Bintan

No.	Nama Kecamatan	Desa	BUMDes yang Terbentuk	Status BUMDes
1.	Bintan Pesisir	Numbing Kelong Mapur Air Glubi	Kurnia Jaya Kelong Berwirausaha Mapur Mandiri Maritim Jaya	Tumbuh/Pemula Tumbuh/Pemula Dasar/Perintis Tumbuh/Pemula
2.	Bintan Utara	Lancang Kuning	Jaya Gemilang	Tumbuh/Pemula
3.	Gunung Kijang	Malang Rapat Teluk Bakau Gunung Kijang	Sahabat Bina Sejahtera Gemilang	Berkembang Tumbuh/Pemula Tumbuh/Pemula
4.	Mantang	Mantang Lama Mantang Baru Mantang Besar Dendun	Karya Bersama Mantang Baru Mantang Sejahtera Maju Bersama	Tumbuh/Pemula Dasar/Perintis Tumbuh/Pemula Tumbuh/Pemula
5.	Seri Kuala Lobam	Teluk Sasah Kuala Sempang Busung	Mitra Perdana Seri Kuala Raya Dendang Betuah	Maju Dasar/Perintis Tumbuh/Pemula
6.	Tambelan	Kampung Hilir Pulau Pinang Kukup Batu Lepuk Mentebung Kampung Melayu Pulau Pengikik	Sehati Sejiwa Harapan Kita Tunas Jaya Bangkit Kembali Maju Melayu Perjuangan Jaya	Maju Dasar/Perintis Tumbuh/Pemula Tumbuh/Pemula Tumbuh/Pemula Berkembang Dasar/Perintis
7.	Teluk Sebong	Ekan Angulai Berakit	Anugrah Ekan Maju Bersama	Maju Tumbuh/Pemula

No.	Nama Kecamatan	Desa	BUMDes yang Terbentuk	Status BUMDes
		Sebong Lagoi Sebong Perih Pengudang Sri Bintang	Bina Bersama Sebong Perih Gemilang Pengudang Jaya Bintang Lestari	Tumbuh/Pemula Dasar/Perintis Berkembang Dasar/Perintis
8.	Teluk Bintang	Tembeling Pengujan Bintang Buyu Pangkil Penaga	Bina Karya Karya Bersama Tri Mufakat Bintang Mitra Bahari Penaga Maju Bersama	Tumbuh/Pemula Tumbuh/Pemula Dasar/Perintis Tumbuh/Pemula Dasar/Perintis
9.	Toapaya	Toapaya Selatan Toapaya Toapaya Utara	Mitra Karya Sejahtera Sukses Jaya Gemilang Bhakti Karya	Berkembang Tumbuh/Pemula Tumbuh/Pemula

Sumber : DPMD Kabupaten Bintan, 2023

Berdasarkan data tersebut, dapat dipastikan bahwa seluruh desa yang ada di kabupaten Bintan telah membentuk BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang ada. Tetapi dalam perkembangan BUMDes tersebut terlihat bahwa masih ada BUMDes yang memiliki perkembangan kurang baik. Hal tersebut tidak selaras dengan status desa yang terlihat lebih baik dari BUMDes yang telah dibentuk. Hal tersebut dapat dilihat dari status IDM desa dibawah ini :

Tabel 1.2 Status IDM Desa

No.	Nama Desa	Tahun	
		2022	2023
1.	Gunung Kijang	Maju	Maju
2.	Teluk Bakau	Maju	Maju
3.	Malang Rapat	Maju	Maju
4.	Lancang Kuning	Maju	Maju
5.	Bintang Buyu	Maju	Maju
6.	Pangkil	Berkembang	Berkembang
7.	Penaga	Maju	Maju
8.	Pengujan	Berkembang	Berkembang

No.	Nama Desa	Tahun	
		2022	2023
9.	Tembeling	Berkembang	Berkembang
10.	Batu Lepuk	Berkembang	Berkembang
11.	Kampung Hilir	Maju	Maju
12.	Kampung Melayu	Maju	Maju
13.	Mentebung	Berkembang	Berkembang
14.	Pulau Pinang	Berkembang	Berkembang
15.	Kukup	Berkembang	Berkembang
16.	Pengikik	Berkembang	Berkembang
17.	Berakit	Maju	Maju
18.	Ekang Anculai	Mandiri	Mandiri
19.	Pengudang	Berkembang	Maju
20.	Sebong Lagoi	Maju	Maju
21.	Sebong Perek	Maju	Maju
22.	Sri Bintang	Maju	Maju
23.	Toapaya	Berkembang	Maju
24.	Toapaya Utara	Berkembang	Maju
25.	Toapaya Selatan	Maju	Mandiri
26.	Mantang Baru	Maju	Maju
27.	Mantang Besar	Maju	Maju
28.	Mantang Lama	Berkembang	Berkembang
29.	Dendun	Berkembang	Berkembang
30.	Kelong	Maju	Maju
31.	Mapur	Berkembang	Berkembang
32.	Numbing	Maju	Maju
33.	Air Glubi	Berkembang	Berkembang
34.	Busung	Berkembang	Berkembang
35.	Teluk Sasah	Berkembang	Berkembang
36.	Kuala Sempang	Berkembang	Berkembang

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2024

Satu diantara desa di Kabupaten Bintan, yakni Desa Toapaya Selatan yang terletak di Kecamatan Toapaya dibentuk melalui proses pemisahan administrasi Desa Toapaya pada tahun 2006. Pada awalnya, Desa Toapaya Selatan tidak memiliki aset maupun Pendapatan Asli Desa (PADes) dan dalam kurun waktu tahun sejak 2008 hingga 2015 desa ini berstatus sebagai desa binaan, namun mulai menghasilkan aset-aset di berbagai sektor melalui dana desa yang diterimanya. Desa Toapaya Selatan

secara progresif telah berupaya dan membenahi diri guna mengoptimalkan perkembangan BUMDes yang telah dibentuk. Dengan ini diharapkan melalui manajemen BUMDes yang efektif akan membawa sejumlah keuntungan, terutama dalam pertumbuhan Pendapatan Asli Desa atau yang disebut PADes sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes.

Pada tahun 2023 Desa Toapaya Selatan berhasil meningkatkan status menjadi desa mandiri. Perwujudan status desa mandiri ini juga dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan desa dan keuangan yang bagus serta prestasi-prestasi yang menjanjikan dimana salah satunya yaitu menjadi juara 3 dalam lomba desa tingkat nasional – regional “Sumatera”. Tetapi hal tersebut tidak berbanding lurus dengan BUMDes yang merupakan salah satu organisasi milik desa, padahal seharusnya BUMDes dan juga desa berbanding lurus karena BUMDes merupakan salah satu instrumen dari desa mandiri yang bertujuan sebagai penguat ekonomi desa melalui kontribusinya terhadap PADes.

BUMDes diharapkan mampu mengstimulasikan dan menggerakkan roda perekonomian di desa. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sulaksana & Nuryanti, (2019), dengan judul “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Studi Kasus di BUMDes Mitra Sejahtera Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka”, pada tahap ini BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dimana peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa sangatlah berpengaruh. Tetapi fakta yang terjadi di Desa Toapaya

Selatan ini, meskipun status desa sudah menjadi Desa Mandiri tetapi hal tersebut tidak seirama dengan pengembangan BUMDes Mitra karya Sejahtera.

Berdasarkan pembahasan mengenai fenomena yang terjadi dilapangan mengenai pengembangan BUMDes Mitra Karya Sejahtera, maka hal tersebut dapat dilihat melalui diagnosa awal bahwa BUMDes tersebut lemah dalam aspek mendeteksi persoalan atau permasalahan yang ada sehingga kita perlu untuk melakukan pengembangan strategi guna mengatasi persoalan tersebut dan saat ini BUMDes Mitra Karya Sejahtera tidak memiliki strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada, kurangnya kepekaan terhadap masalah-masalah yang muncul dapat mempengaruhi pengembangan BUMDes. Selanjutnya mengembangkan kegiatan atau strategi yang telah dibentuk dengan memanfaatkan potensi yang ada, setelahnya dilakukan evaluasi bahwa strategi tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak guna pengembangan BUMDes Mitra Karya Sejahtera. Dari hasil pengamatan ataupun diagnosa yang telah dilakukan peneliti, diketahui bahwa BUMDes Mitra Karya Sejahtera ini tidak berkembang seiring dengan status desa mandiri dan pengelolaan unit-unit yang ada masih belum stabil. Oleh karena itu dalam pengelolaannya diperlukan pengembangan lebih lanjut terhadap unit-unit usaha BUMDes Mitra Karya Sejahtera.

Tabel 1.3 Unit Usaha BUMDes Serta Kontribusi Terhadap PADes

Sektor	Unit Usaha	Kontribusi Terhadap PADes Serta Penyertaan Modal		
		2021	2022	2023
Pariwisata	Desa Wisata			
Penyewaan & Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • BUMDes <i>Mart</i> • Kios Perdagangan • Auning Desa • <i>Sound System</i> • Papan Reklame 	Rp. 7.796.250,- <i>Dengan penyertaan modal sebesar</i>	Rp. 14.088.936,- <i>Tanpa penyertaan modal</i>	Rp. 20.212.280,- <i>Dengan Penyertaan modal sebesar</i> Rp. 147.752.116,-
		Rp. 162.288.000,-		
Peternakan	Bebek			
Perkebunan	Tanaman Cabai			

Sumber : Pemerintah Desa Toapaya Selatan (2023)

Badan Usaha Milik Desa Toapaya Selatan dengan nama Mitra Karya Sejahtera ini dibentuk pada tahun 2016 dengan menyandang sebagai BUMDes Perintis kemudian pada tahun 2018 berhasil meningkatkan status menjadi Pemula dan pada tahun 2021 menjadi BUMDes dengan status baru yaitu berkembang serta memiliki empat sektor usaha yaitu diantaranya sektor perdagangan dan jasa penyewaan, sektor wisata desa, sektor peternakan, sektor perkebunan. Untuk Saat ini beberapa bidang usaha BUMDes yang aktif adalah kios-kios yang disewakan kepada masyarakat untuk membuka usaha mulai dari makanan, tempat usaha fotokopi, hingga *Mini market* (BUMDes *Mart*) yang mempekerjakan warga sekitar desa, dan juga adanya aula acara bagi masyarakat desa (*AUNING* Desa), Orgen *sound system* desa (*Topsela Entertainment*) selain itu juga pada bidang perkebunan dan peternakan. Dalam sektor ekowisata yang terdiri dari fasilitas wisata seperti motor *All Terrain Vehicle* (ATV) hingga area panahan BUMDes Desa Toapaya Selatan mengalami penghentian sementara dikarenakan merabak nya wabah *Covid-19* yang

melanda Indonesia, dan hingga saat ini di masa pemulihan pasca wabah *Covid-19* ini pengoperasian kembali sektor ekowisata tersebut sedang dalam perencanaan.

Tabel 1.4 Status BUMDes di Kecamatan Toapaya

No	Desa	Nama BUMDes	Status BUMDes							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Toapaya Selatan	Mitra Karya Sejahtera	Per.	Per.	Pem.	Pem.	Pem.	Ber.	Ber.	Ber.
2.	Toapaya	Sukses Jaya Gemilang	Per.	Per.	Per.	Per.	Pem.	Pem.	Pem.	Pem.
3.	Toapaya Utara	Bhakti Karya	Per.	Per.	Per.	Per.	Pem.	Pem.	Pem.	Pem.

Sumber : Pemerintah Desa di Kecamatan Toapaya (2023)

Keterangan :

Per. = Perintis Ber. = Berkembang Pem. = Pemula M = Maju

Merujuk pada fenomena yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Karya Sejahtera di Desa Toapaya Selatan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) Mitra Karya Sejahtera di Desa Toapaya Selatan dalam mengelola unit usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi bagaimana pengembangan yang dilakukan oleh BUMDes Mitra Karya Sejahtera di Desa Toapaya Selatan dalam mengelola unit usaha untuk menyokong pembangunan ekonomi pedesaan sebagai salah satu contoh BUMDes pada desa mandiri yang ada di Kabupaten Bintan yang masih berstatus berkembang dalam mengelola aset-aset kekayaan desa.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah ilmu dan menjadi pedoman dan referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam pengembangan BUMDes terutama dalam sektor pemerintahan desa.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan untuk melakukan perbaikan khususnya dalam pengelolaan BUMDes.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk gagasan-gagasan untuk perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu pemerintahan, dan menjadi acuan yang berguna dalam penelitian-penelitian serupa.

